

200 Ribu Buruh Karawang

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

rencananya akan turun ke Gedung DPR untuk berunjuk rasa bersama-sama menyuarakan penolakan aturan yang dinilai merugikan para pekerja.

Dia mengatakan, pekerja dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja yang isinya banyak yang tidak berpihak pada pekerja. Di antaranya aturan terkait klaster ketenagakerjaan. Isinya dianggap mendegradasi

para pekerja di lingkungan swasta.

"Contohnya upah nggak ada lagi upah sektoral, kedua pesangon dari 32 kali upah turun jadi 25 kali upah. Nggak ada batasan kontrak kerja itu mau satu bulan juga semauanya pengusaha saja, outsourcing semua jenis pekerjaan. Jelas itu merugikan kami," tuturnya.

Menurut dia, saat ini, situasi sedang dalam masa Pan-

demi Covid-19, sehingga aksi berkerumun tidak dianjurkan. Namun, menurutnya, aksi ini harus tetap dilakukan dan pelaksanaannya akan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Kita memahami kondisi pandemi seperti ini kita harus menyuarakan penolakan karena ini mendesak. Justru yang harus dipertanyakan di tengah situasi Pandemi seperti ini DPR ngotot membahas Omnibus

Law bahkan sampai tengah malam," ujarnya.

Oleh karena itu, aksi di Karawang dilakukan di masing-masing pabrik. Sehingga diharapkan tidak bercampur baur dengan buruh dari perusahaan lain guna mencegah penyebaran Covid-19.

"Kalau gabungan semua KBPP dengan serikat kerja metal, tekstil, manufaktur semuanya ada 200 ribu buruh yang siap beraksi," kata dia. (bbs/mhs)